

**RENCANA KERJA
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN
TAHUN 2019**



**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN**

DESEMBER 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Tahunan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan (PPH) Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan tahunan keempat yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) serta disusun mengacu pada RKP Tahun 2019. Penyusunan Renja Direktorat PPH Tahun 2019 mengacu kepada Renja Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM LHK) dan dilaksanakan setelah dikeluarkannya Rancangan Awal RKP yang di dalamnya mencakup Proyek Prioritas Nasional lingkup GAKKUM KLHK. Proyek Prioritas Nasional lingkup GAKKUM KLHK merupakan rencana program dan kegiatan K/L berdasarkan Pagu Indikatif Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2019. Rencana Kerja Direktorat PPH memuat sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh Direktorat PPH, arah kebijakan, program, kegiatan pembangunan, dan kebutuhan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penjelasan Umum Rencana Kerja Direktorat PPH ini diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan oleh Direktorat PPH terutama pencapaian Sasaran Proyek Prioritas Nasional di dalam Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia.

Bagi Direktorat PPH yang terkait langsung dengan pencapaian prioritas nasional pada tahun 2019, maka program dan kegiatannya harus dapat secara langsung mencerminkan pencapaian prioritas nasional yang telah ditetapkan.

B. Kondisi Umum

Lingkup kondisi yang dimaksud dalam hal ini adalah selain kondisi institutive juga kondisi substantif. Adapun kondisi *institutive* secara generik meliputi perihal manajemen, administrasi, dan organisasi. Sedangkan kondisi substantive meliputi substansi yang relevan dengan bidang tugas dan fungsi Direktorat PPH, seperti misalnya kondisi lingkungan hidup dan hutan serta kondisi kesehatan ekologis dan

kondisi keberfungsian ekosistem yang dapat berubah oleh keberhasilan upaya penegakan hukum, yaitu menurunkan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Keberhasilan termasuk di atas merupakan dampak dan/atau manfaat dari keluaran dari kegiatan penegakan hukum yang secara garis besar meliputi:

- Peningkatan layanan pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan;
- Peningkatan layanan penyelesaian sengketa perdata lingkungan hidup dan kehutanan;
- Peningkatan ketaatan usaha/kegiatan atas kewajiban, larangan dan/atau persyaratan mengenai pengendalian pencemaran/perusakan lingkungan hidup;
- Pencegahan dan pengamanan asset hutan yang pengelolaannya dikuasakan kepada Kementerian LHK;
- Penurunan tindakan pelanggaran hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan;

C. Kondisi Khusus



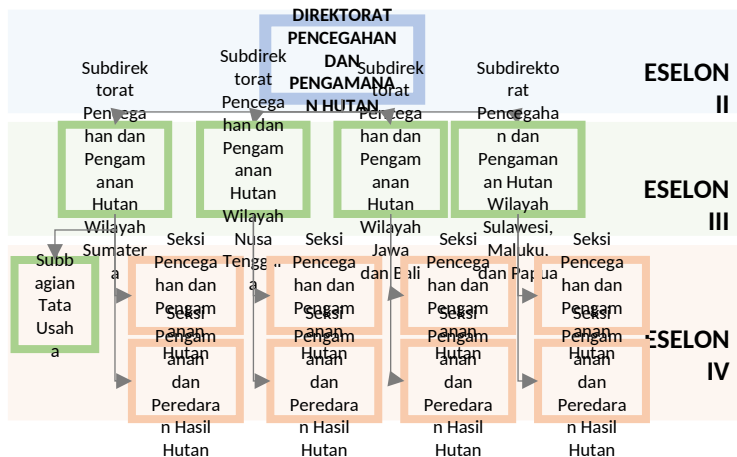
Peningkatan implementasi kapasitas penegakan hukum terus dilaksanakan dengan tujuan mengatasi perma-salahan -

permasalahan yang terjadi. Berangkat dari kebutuhan peningkatan kapasitas penegakan hukum tersebut, pendekatan penegakan hukum dibuat untuk mendukung pendaya gunaan strategi yang akan di implementasikan dan diharapkan dapat memeberikan terobosan terobosan dalam mendukung dan mengawal kegiatan penegakan hukum. Pendekatan penegakan hukum yang akan digunakan antara lain: Peningkatan kapasitas penegakan hukum, penerapan multi instrumen hukum, penerapan multi rejim hukum (*Multidoors*), dan penerapan kebijakan simbolik.

D. Struktur Organisasi dan SDM

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:

P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Pada Pasal 1162 di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pencegahan dan pengamanan hutan.

Adapun pada Pasal 1163 dijabarkan bahwa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1162, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan;
- penyiapan pelaksanaan kebijakan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan;
- penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan;
- penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan;
- bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervise pelaksanaan urusan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan

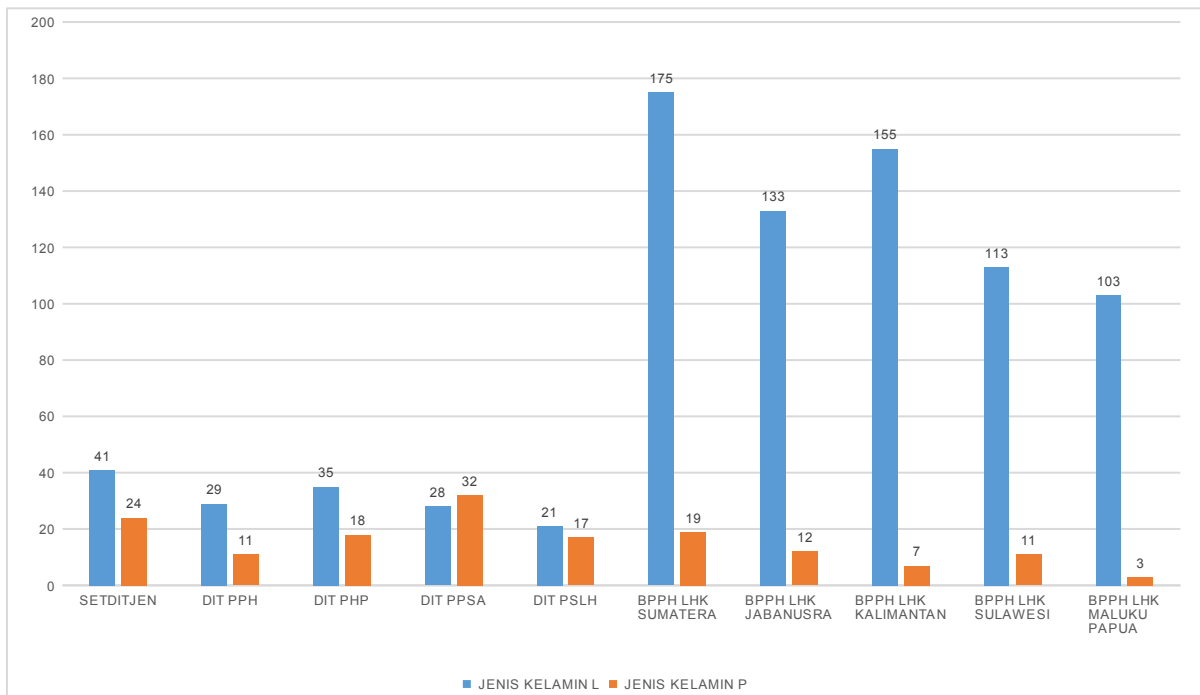
pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan yang dilaksanakan di daerah; dan

- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam menjalan tugas dan fungsi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sumber daya yang dialokasi pada Ditjen PHLHK masih sangat terbatas, baik sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan dan sarana.

Adapun komposisi sumber daya tersebut sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini memiliki 987 pegawai pria dan wanita yang tersebar di 10 Satuan Kerja, seperti gambar di bawah ini:



Jumlah Pegawai pada Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan sebanyak 45 orang dengan komposisi jenis kelamin laki-laki 35 orang dan perempuan 10 orang. Komposisi jabatan: Eselon 2 (1 orang), Eselon 3 (4 orang), Eselon 4 (9 orang) dan ada 9 orang Fungsional Polisi Kehutanan

BAB II

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DAN PROGNOSIS TAHUN 2019

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018

Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PPH pada Tahun 2018 seperti terlihat dalam tabel berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	2018				
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN /OUTPUT	CAPAIAN (LAKIP)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI
029.10.12.02	DITJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN					
5428	Pencegahan dan Pengamanan Hutan					
001		Luas kawasan hutan yang dapat dilindungi dari kegiatan ilegal meningkat setiap tahun	750.000	843.370	16.117.160.000	15.972.234.166
004		Jumlah Polhut yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	1127 Orang	1.630 Orang	14.868.602.000	14.520.882.765

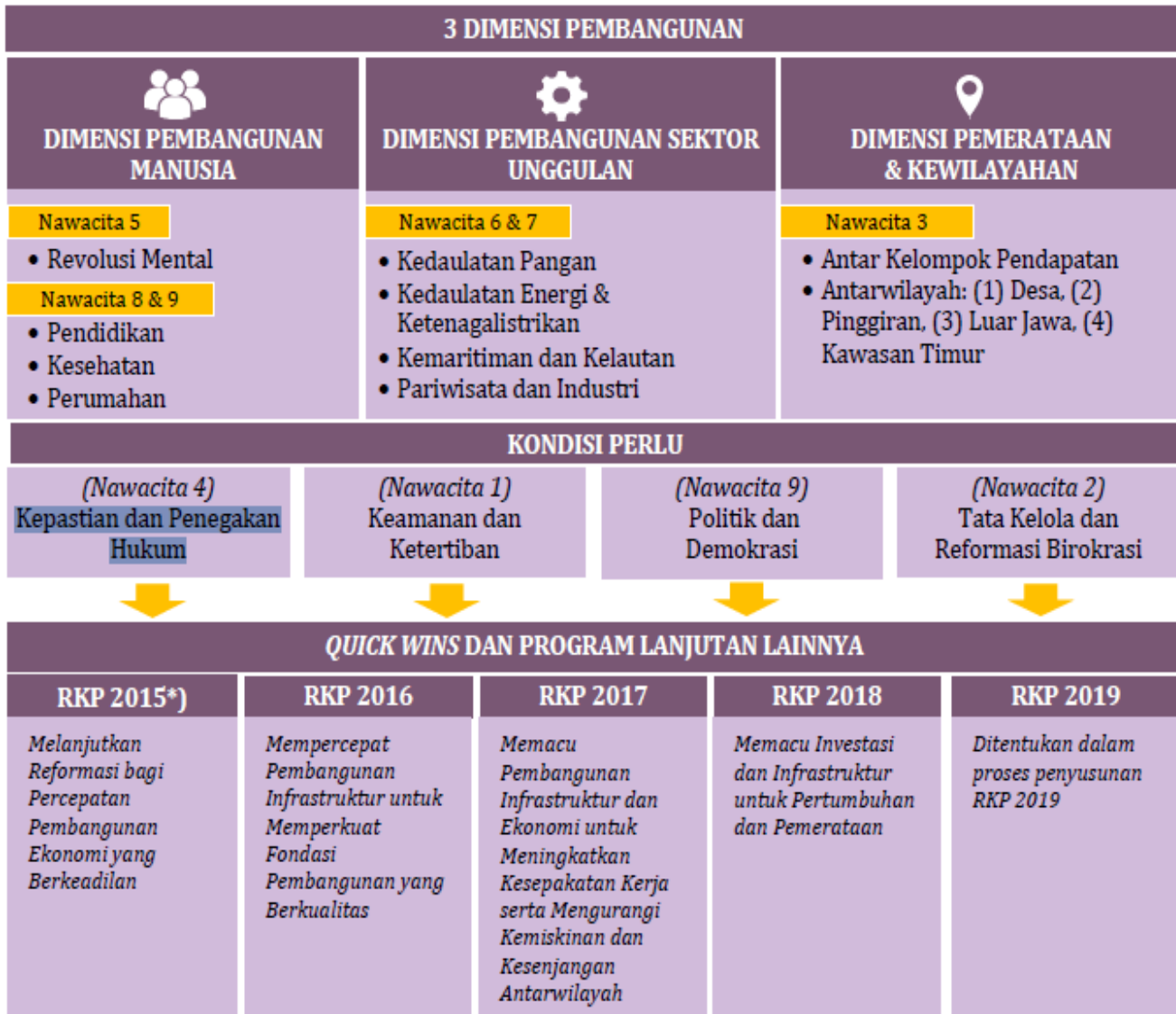
B. Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019

Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2019 masih dalam proses pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan hingga 31 Desember 2019. Berikut merupakan tabel Prognosis Capaian Indikator Kinerja Per masing Masing Kegiatan (M.A.K) sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	2019				
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN/OUTPUT	PROGNOSIS CAPAIAN	ALOKASI	PROGNOSIS REALISASI
029.10	DITJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN					
5428	Pencegahan dan Pengamanan Hutan					
001		Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	320.000 di 34 Provinsi	320.000 ha	18.001.163.000	18.001.163.000
002		Luas hutan DAS Citarum yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patrol dan operasi	5.000 ha	5.000 ha	3.581.160.000	3.581.160.000
004		Sarana, Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan yang memenuhi standar minimum	1 Lokasi	1 Lokasi	9.867.677.000	9.867.677.000

BAB III
RENCANA KERJA TAHUN 2019

A. Strategi dalam mendukung Prioritas Nasional



Nawacita 4:

Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

**SASARAN UMUM PRIORITAS NASIONAL POLITIK, HUKUM,
PERTAHANAN DAN KEAMANAN**

Sasaran	2014 (baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
Sasaran Pembangunan Pertahanan						
Pemenuhan MEF TNI (%)	28,10	36,44	44,60	53,10	62,00	71,20
Potensi Kontribusi Industri Pertahanan Nasional (%)	21,30	37,50	46,00	47,00	49,80	53,80
Sasaran Pembangunan Politik dan Keamanan						
Skor Indeks Demokrasi Indonesia	63,72	73,04	72,82	74,3	74,6	75
Pengungkapan dan Penyelesaian Kasus Tindak Pidana (%)	-	-	-	60	60	65
Laju Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba	-0,02	0,05	-0,29	0,04	0,03	0,03
Pencapaian target indeks perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI)/badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri	N/A	N/A	N/A	79,73	82,21	82,21
Sasaran Pembangunan Hukum						
Indeks Pembangunan Hukum (Skala 0-1)	0,31	0,48	0,57	0,59 – 0,64	0,65 – 0,70	0,75
Indeks Penegakan Hukum Tipikor (Skala 1 – 100)	61,80	50,06	62,60	n.a.*	n.a.*	Kenaikan Indeks 20%
Indeks Perilaku Anti Korupsi (Skala 0-5)	3,61	3,68	n.a.**	3,80	3,90	4,00
Sasaran Pembangunan Aparatur Negara						
Indeks E-Government (K/L; prov; kab/kota)	2,70	2,90	3,00	3,20	3,30	3,40
	2,40	2,90	3,00	3,20	3,30	3,40
	2,40	2,90	3,00	3,20	3,30	3,40

Arah Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan Dan Keamanan, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat melalui:

- a. penegakan hukum yang berkualitas;
- b. pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; dan
- c. penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1.	Penegakan Hukum yang Berkualitas	<p>Meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • terlaksananya penanganan perkara yang berkualitas; • berkurangnya <i>over-crowding</i> di lembaga pemasyarakatan; • terbangunnya sistem penanganan perkara pidana terpadu berbasis teknologi informasi; • terselenggaranya pelayanan hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung iklim investasi; • terselenggaranya pendidikan dan pelatihan terpadu untuk sistem peradilan pidana anak; • terlaksananya peningkatan kualitas analisa dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan; dan • terlaksananya penanganan perkara sumber daya alam yang berkualitas. 	Pusat dan daerah (34 provinsi).
2.	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif	<p>Optimalisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • terlaksananya konsolidasi upaya pencegahan tindak pidana korupsi; dan • terlaksananya optimalisasi pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi. 	Pusat.
3.	Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan	<p>Terpenuhinya akses masyarakat terhadap hak atas keadilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • terbangunnya sistem penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terpadu; dan • terselenggaranya pelaksanaan bantuan hukum secara optimal. 	Pusat dan daerah (34 provinsi).

9. PN POLITIK, HUKUM, DAN PERTAHANAN KEAMANAN



B. Program dan Kegiatan Tahun 2019

1. Indikator Kinerja Utama

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor; P.78/MenLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK mendukung 3 (Tiga) dari 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai yang tertera pada Pasal 1 yaitu:

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2019 berada pada rentang 66,5-68,6 (IKU I);
- b. Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak dari produksi barang dan jasa hutan dan lingkungan hidup pada tahun 2019 sebesar 3,9 Triliun (IKU II);
- d. Jumlah Kumulatif kawasan konservasi yang memiliki nilai efektifitas pengelolaan minimal 70 pada Tahun 2019 sebanyak 260 Unit (IKU IV);

K/L	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
	Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat (SS 1)	Indeks kualitas lingkungan hidup berada pada kisaran 64-65 (IKU 1)
	Memanfaatkan Potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (SS 2)	Jumlah PNBP dari Produksi Barang dan Jasa hutan dan lingkungan hidup pada tahun 2017 sebesar Rp. 3,9 triliun (IKU 2)
	Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (SS 3)	Jumlah kumulatif kawasan konservasi yang memiliki nilai efektifitas pengelolaan minimal 70 sebanyak 260 Unit (IKU 4)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran kinerja yang akan digunakan menyusun laporan akuntabilitas kinerja tingkat Kementerian.

2. Indikator Kinerja Program

Sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK Tahun 2015 s/d 2019, Kegiatan-Kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup yaitu:

Kode	Program (1)	Kegiatan (2)	Penanggung Jawab (3)
P7	Penegakan Hukum LHK (P7)		
K1		Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan
K2		Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
K3		Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi
K4		Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan
K5		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Unit Lainnya	Sekretariat Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK

Program (1)	Sasaran Program (2)	Output Program (3)	Indikator Kinerja Program (4)	Target 2019*
Penegakan Hukum LHK (P7)				
	Seluruh Pemegang Izin Lingkungan Menaati Peraturan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan	Meningkatnya ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan	650
	Meningkatnya Hak-Hak Negara atas Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup	Penyelesaian kasus sampai P21 untuk penebangan liar, penyelundupan dan peredaran ilegal TSL	Jumlah penyelesaian kasus sampai P21 untuk penebangan liar, penyelundupan dan peredaran ilegal TSL	125 Kasus
	Meningkatkan kawasan hutan (termasuk kawasan konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan hutan	Kawasan Hutan (termasuk Kawasan konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan hutan	Seluruh Unit Kawasan Hutan (termasuk Kawasan konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan hutan	2.669.000 Hektar

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan TA 2019
	(1)	(2)
K1	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Keamanan Kawasan Hutan di 34 Provinsi	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan Sosialisasi, Patroli dan Operasi
I.	Prioritas Nasional	Kelembutan dan Bertalenta Kegiatan Sosialisasi, Patroli dan Operasi
II.	Program Ancaman Keamanan Kawasan Hutan	Kapasitas dan Penyediaan Sarana Prasarana SPORC
III.	Proyek Prioritas Nasional	Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam
N6	Meningkatnya Efektivitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Pendaftaran, Penyusunan Gugatan, Pelaksanaan Putusan Gugatan Perdata Melalui Pengadilan
	Proyek K/L (1)	Target TA 2019 (2)
1	Pencegahan Tindakan Pemanfaatan SDA dan Pengamanan Kawasan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	2.669.000 Hektar
2	Peningkatan efektivitas penanganan pengaduan masyarakat terkait pemanfaatan SDA	Tertanganinya 100% pengaduan yang masuk
3	Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait pemanfaatan SDA pengawasan izin, izin lingkungan, izin PPLH dan PPU, ketepatan terhadap Sanksi Administrasi	Peningkatan Penataan Usaha dan/atau kegiatan terhadap perizinan LHK dan PUU yang berlaku
4	Pengawasan penanggungjawab usaha/kegiatan dalam pemanfaatan SDA	Penerapan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan 630 izin
5	Penegakan Hukum Administrasi Pemanfaatan SDA	Peningkatan Kapasitas dan Penyediaan Sarana Prasarana PPLH 105 Sanksi Administrasi
6	Meningkatnya jumlah kasus pidana lingkungan yang ditangani oleh PNS	Kasus pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21 (Berkes Perkara di nyatakan lengkap)
7	Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan SDA	25 kesepakatan
8	Penyediaan Sarana dan Prasarana Apgakum Bidang SDA	2500 Orang (POLHUT, PPLH,PPNS)
	1	70.869.227.500
	2	66.194.830.000
	3	16.022.600.000
	4	13.750.000.000
	5	8.000.000.000
	6	9.599.000.000
	7	8.600.000.000
	8	46.998.342.500
	TOTAL	234.534.000.000
No	Output K/L (Prioritas Bidang)	Alokasi Anggaran Proyek K/L
(1)	(2)	(3)
9	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Unit Lainnya	13.798.201.000

3. Indikator Kinerja Kegiatan

A. Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan (K1)

Kegiatan K/L	Sasaran Kegiatan	Output	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Pencegahan dan Pengamanan Hutan (K1)	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Keamanan Kawasan Hutan di 34 Provinsi	Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan Sosialisasi, Patroli dan Operasi	320.000 Hektar
		Sarana, Prasarana dan Kapasitas Polisi Kehutanan dalam Pelaksanaan Pengamanan dan Penegakan Hukum memenuhi standar minimum	1 Lokasi

Proyek PN	Sasaran Proyek Prioritas Nasional	Output	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Proyek Penegakan Hukum bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Penegakan Hukum bidang Sumber Daya Alam	Pencegahan Tindak Pidana Pemanfaatan SDA dan Pengamanan Kawasan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	5.000.000 Hektar
		Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Aparat Penegak Hukum	1800 Orang

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2019 ini tak hanya berisi semangat untuk memperkuat apa yang telah dicapai di tahun 2018, namun demikian didalamnya memuat komitmen meletakkan landasan pencapaian pembangunan tahun 2019.

Dengan demikian, Rencana Kerja Tahun 2019 ini menjadi media yang dapat memandu setiap gerak dan langkah Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan. Selanjutnya, seluruh intervensi (regulasi dan anggaran) dari seluruh unit kerja diharapkan dapat dipastikan kemanfaatannya didalam mendukung secara langsung pemenuhan kinerja.

Pemantauan dari upaya pencapaian kinerja ini akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dalam bentuk Audit kinerja, sedangkan Sekretariat Jenderal diharapkan dapat mengkoordinasikan pemantauan kinerja yang akan dituangkan ke dalam LAKIP Kementerian tahun 2019.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

RINCIAN USULAN KEGIATAN DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN
TA 2019

OUT PUT	KOMPO NEN	URAIAN	ANGGARAN	RM	PNBP
			31,450,000,000	18,331,919,000	13,118,081,000
5428 .001		Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	18,001,163,000	11,732,923,000	6,268,240,000
	051	Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Keamanan Bidang Kehutanan	7,879,994,000	2,819,177,000	5,060,817,000
	052	Penguatan Koordinasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan	2,153,856,000	1,668,996,000	484,860,000
	053	Operasi Pengaman Hutan	5,167,600,000	5,167,600,000	0
	054	Operasi Peredaran Hasil Hutan	1,576,000,000	1,576,000,000	0
	056	Kesamaptaan Polhut	927,400,000	501,150,000	426,250,000
	057	Penguatan Tugas dan Fungsi Pencegahan dan Pengamanan Hutan	296,313,000	0	296,313,000
5428 .002		Luas hutan DAS Citarum yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	3,581,160,000		3,581,160,000
	051	Operasi pengamanan dan peredaran hasil hutan di DAS Citarum	2,336,800,000		2,336,800,000
	052	Pencegahan perusakan hutan di DAS Citarum	1,244,360,000		1,244,360,000
5428 .004		Sarana, Prasarana Pencegahan dan Pengamanan yang memenuhi standar minimum	9,867,677,000	6,598,996,000	3,268,681,000
	051	Penyediaan Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan	9,867,677,000	6,598,996,000	3,268,681,000